

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 032.05.1.449520/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
- Sebesar : Rp. 395.550.588.000 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 04 EKONOMI
- 04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	327.122.147.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	68.428.441.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 395.550.588.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

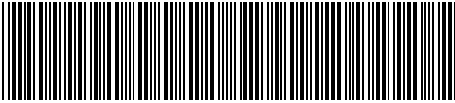
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025

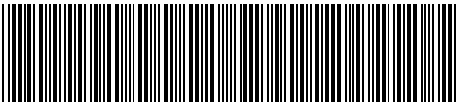


DS:5886-0003-7144-3183

Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	281.454.162.000
HB.2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	Rp.	255.625.477.000
HB.2351	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	Rp.	6.245.390.000
HB.2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp.	17.548.808.000
HB.2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	Rp.	2.034.487.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	114.096.426.000
WA.2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp.	114.096.426.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
I A. INFORMASI KINERJA

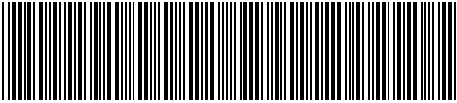


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program	:	032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			281.454.162.000	
Kegiatan	:	2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP			255.625.477.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks kinerja operasi pesawat patroli				
		2. 01	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP				
		3. 02	Indeks kinerja operasi kapal pengawas				
		4. 02	Persentase prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan				
		5. 03	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP				
		6. 03	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas				
		7. 04	Indeks kesiapan logistik dan awak kapal pengawas				
		8. 04	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP				
		9. 05	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2350.999	Output Cadangan	1,00	cadangan	35.271.977.000
Rincian Output	:	01	999.999				35.271.977.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2350.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	300.000.000
Rincian Output	:	01	ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	300.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2350.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	220.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	1.00	NSPK	220.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
I A. INFORMASI KINERJA

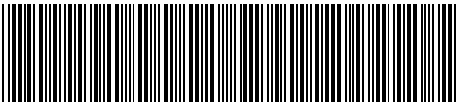


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Klasifikasi Rincian Output	4	:	2350.BKB	Pemantauan produk	4,00	laporan	1.183.000.000
Rincian Output	:	01	BKB.001	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipantau	4.00	laporan	1.183.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	2350.CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	4,00	Unit	200.000.000
Rincian Output	:	01	CAL.001	Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan	4.00	Unit	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	2350.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	25,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	547.000.000
Rincian Output	:	01	FBA.001	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada	25.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	547.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	947,00	Operasi	216.070.270.000
Rincian Output	:	01	QHD.001	Operasi Kapal Pengawas (PN)	807.00	Operasi	176.070.270.000
		02	QHD.002	Operasi Pesawat Patroli (PN)	140.00	Operasi	40.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10,00	Unit	1.833.230.000
Rincian Output	:	01	RCG.001	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat (PN)	10.00	Unit	1.833.230.000
Kegiatan	:	2351	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan				6.245.390.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan				
		2. 01	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan				
		3. 01	Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
I A. INFORMASI KINERJA

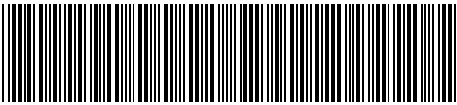


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan										
	4.	01	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran							
	5.	02	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan							
	6.	02	Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif							
	7.	02	Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa							
	8.	03	Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain							
	9.	03	Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan							
	10.	04	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan							
	11.	04	Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan							
	12.	05	Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif							
Klasifikasi Rincian Output	9	:	2351.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan				2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	264.000.000
Rincian Output	:	01	ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan				2.00	Rekomendasi Kebijakan	264.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	2351.AEA	Koordinasi				4,00	kegiatan	2.054.000.000
Rincian Output	:	01	AEA.002	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan				4.00	kegiatan	2.054.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	2351.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	194.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran				1.00	NSPK	194.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
I A. INFORMASI KINERJA

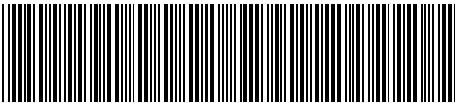


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Klasifikasi Rincian Output	12	:	2351.BCB	Perkara Hukum Lembaga	4,00	Perkara, Berkas Perkara	300.000.000	
Rincian Output		:	01	BCB.001	Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	4.00	Perkara	300.000.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	2351.BCE	Penanganan Perkara	16,00	Perkara, Berkas Perkara	1.783.390.000	
Rincian Output		:	01	BCE.001	Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	2.00	Perkara	1.098.000.000
		:	02	BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	11.00	Perkara	314.640.000
		:	03	BCE.U04	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	3.00	Perkara	370.750.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	2351.BKB	Pemantauan produk	12,00	laporan	1.650.000.000	
Rincian Output		:	01	BKB.001	Penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau	12.00	laporan	1.650.000.000
Kegiatan		:	2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				17.548.808.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan				
		:	2. 01	Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan				
		:	3. 01	Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri				
		:	4. 01	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI				
		:	5. 01	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				
		:	6. 01	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan				
		:	7. 02	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan				
		:	8. 02	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan				
		:	9. 02	Persentase Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Ditandatangani				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
I A. INFORMASI KINERJA

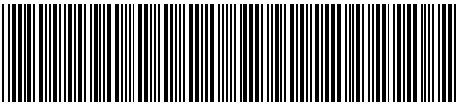


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
	10.	02	Tingkat akurasi dan validitas analisis hasil pemantauan SDKP						
	11.	02	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan						
	12.	03	Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU						
	13.	03	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan						
	14.	03	Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan						
	15.	03	Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan						
	16.	04	Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan						
	17.	04	Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan						
Klasifikasi Rincian Output	15	:	2352.999	Output Cadangan		1,00	cadangan		196.667.000
Rincian Output		:	01	999.999					196.667.000
Klasifikasi Rincian Output	16	:	2352.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		4,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian		522.000.000
Rincian Output		:	01	ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	2.00	Rekomendasi Kebijakan		200.000.000
		:	02	ABW.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	2.00	Rekomendasi Kebijakan		322.000.000
Klasifikasi Rincian Output	17	:	2352.ACA	Perizinan Produk		4.000,00	Produk, Keputusan		1.511.000.000
Rincian Output		:	01	ACA.001	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	4000.00	Produk		1.511.000.000
Klasifikasi Rincian Output	18	:	2352.AEA	Koordinasi		4,00	kegiatan		3.291.150.000
Rincian Output		:	01	AEA.001	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	2.00	kegiatan		1.732.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
I A. INFORMASI KINERJA

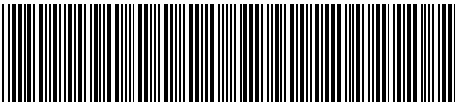


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Koordinasi				kegiatan		
	02	AEA.002	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan	2.00	kegiatan	1.559.150.000
Klasifikasi Rincian Output	19	2352.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3.00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	553.000.000
Rincian Output	: 01	AFA.001	NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1.00	NSPK	198.000.000
	02	AFA.002	NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	2.00	NSPK	355.000.000
Klasifikasi Rincian Output	20	2352.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	2.00	Operasi	249.494.000
Rincian Output	: 01	BHD.001	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	2.00	Operasi	249.494.000
Klasifikasi Rincian Output	21	2352.BII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	2.00	Hektar, Laporan	35.000.000
Rincian Output	: 01	BII.001	Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan	2.00	Laporan	35.000.000
Klasifikasi Rincian Output	22	2352.BKB	Pemantauan produk	30.00	laporan	4.708.988.000
Rincian Output	: 01	BKB.001	Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau	18.00	laporan	3.113.988.000
	02	BKB.002	Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan yang dipantau	12.00	laporan	1.595.000.000
Klasifikasi Rincian Output	23	2352.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	33.00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	907.508.000
Rincian Output	: 01	FBA.001	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	18.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	454.508.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
I A. INFORMASI KINERJA

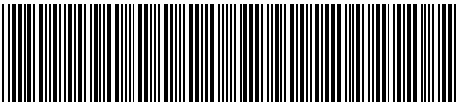


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah						Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota			
	02	FBA.002	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan			15.00	Provinsi	453.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	24	:	2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			30,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	1.763.001.000
Rincian Output	:	01	QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya (PN)			20.00	Lembaga	1.649.668.000
	:	02	QIC.002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya (PN)			10.00	Lembaga	113.333.000
Klasifikasi Rincian Output	25	:	2352.RDS	OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			1,00	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	3.811.000.000
Rincian Output	:	01	RDS.001	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional (PN)			1.00	Unit	3.811.000.000
Kegiatan	:	2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan						2.034.487.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas						
	:	2. 01	Intensitas konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						
	:	3. 01	Kandungan elemen pengawasan, penegakan hukum, dan pengenaan sanksi dalam regulasi tata kelola kelautan dan perikanan						
	:	4. 01	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan dan perikanan						
	:	5. 02	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas						
	:	6. 02	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						
Klasifikasi Rincian Output	26	:	2353.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			391,00	Orang	1.040.000.000
Rincian Output	:	01	BDC.001	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan			100.00	Orang	242.000.000
	:	02	BDC.002	Nelayan yang difasilitasi pemulangnya			53.00	Orang	264.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
I A. INFORMASI KINERJA

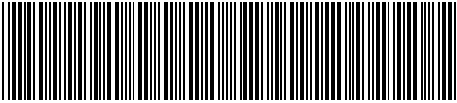


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				Orang		
	03	BDC.003	Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	66.00	Orang	264.000.000
	04	BDC.004	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	172.00	Orang	270.000.000
Klasifikasi Rincian Output	27	: 2353.BKB	Pemantauan produk	12.00	laporan	330.500.000
Rincian Output		: 01	BKB.001 Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	12.00	laporan	330.500.000
Klasifikasi Rincian Output	28	: 2353.BMB	Komunikasi Publik	1.00	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	663.987.000
Rincian Output		: 01	BMB.001 Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.00	kegiatan	663.987.000
Program	: 032.05.WA		Program Dukungan Manajemen	114.096.426.000		
Kegiatan	: 2355		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	114.096.426.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:		1. 01 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PSDKP			
			2. 03 Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran			
			3. 04 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP			
			4. 05 Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA			
			5. 06 Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PSDKP			
			6. 07 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP			
			7. 09 Nilai PMSAKIP Ditjen PSDKP			
			8. 11 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
I A. INFORMASI KINERJA

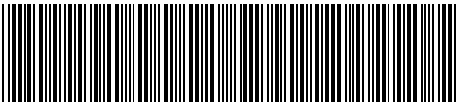


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
9.	12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP
10.	13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Ditjen PSDKP
11.	14	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
12.	15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Ditjen PSDKP
13.	16	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen PSDKP
14.	17	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP
15.	18	Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP
16.	19	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
17.	20	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP
18.	21	Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP
19.	22	Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK
20.	23	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP
21.	24	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Ditjen. PSDKP
22.	25	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP
23.	26	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen. PSDKP
24.	27	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP
25.	28	Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen. PSDKP
26.	29	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
27.	30	Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP
28.	31	Indeks Efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP
29.	32	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP
30.	33	Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PSDKP

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
I A. INFORMASI KINERJA

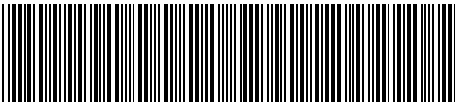


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
31. 35		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2355.AEC	Kerja sama	1,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	2.600.000.000		
Rincian Output		:	01	AEC.001 Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,00	Dokumen	2.600.000.000		
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2355.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	51,00	Unit	614.280.000		
Rincian Output		:	01	CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	51,00	Unit	614.280.000		
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	85.755.993.000		
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	8,00	Layanan	804.000.000		
		:	02	EBA.957 Layanan Hukum	1,00	Layanan	790.000.000		
		:	03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3,00	Layanan	1.084.600.000		
		:	04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	460.039.000		
		:	05	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	4.949.653.000		
		:	06	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	873.264.000		
		:	07	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	2,00	Layanan	42.976.000		
		:	08	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	76.751.461.000		
Klasifikasi Rincian Output	4	:	2355.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	389,00	Unit, m2, Paket	3.746.435.000		
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	382,00	Unit	2.546.435.000		
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	7,00	Unit	1.200.000.000		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:5886-0003-7144-3183

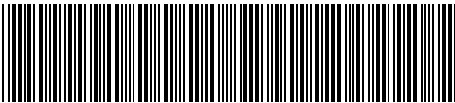
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Klasifikasi Rincian Output	5	:	2355.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.531,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	8.639.209.000	
Rincian Output		:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1259.00	Orang	1.969.209.000
		:	02	EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	272.00	Orang	6.670.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	23,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	12.740.509.000	
Rincian Output		:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9.00	Dokumen	4.968.138.000
		:	02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	11.00	Dokumen	563.205.000
		:	03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan	3.371.200.000
		:	04	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Layanan	3.138.257.000
		:	05	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Dokumen	699.709.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal PSDKP

ttd.
Pung Nugroho Saksono
196904221992031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
I B. SUMBER DANA



DS:5886-0003-7144-3183

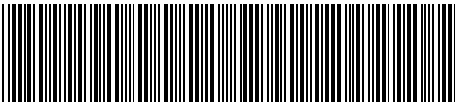
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	395.550.588.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	327.122.147.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	68.428.441.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

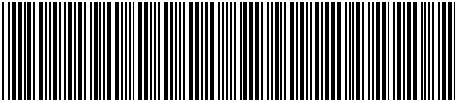


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	59.012.285	332.198.634	4.339.669	-	-	395.550.588	01 . 51	
032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	-	280.275.208	1.178.954	-	-	281.454.162		
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	-	254.507.477	1.118.000	-	-	255.625.477		
2350.999	Output Cadangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	34.353.977	918.000	-	-	35.271.977		
01	RM	-	34.353.977	918.000	-	-	35.271.977		
2350.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	300.000	-	-	-	300.000		
01	RM	-	300.000	-	-	-	300.000		
2350.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	220.000	-	-	-	220.000		
01	RM	-	220.000	-	-	-	220.000	175@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2350.BKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.183.000	-	-	-	1.183.000	01 . 51	
01 RM		-	1.183.000	-	-	-	1.183.000	175@	
2350.CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	200.000	-	-	200.000	01 . 51	
01 RM		-	-	200.000	-	-	200.000	175	
2350.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	547.000	-	-	-	547.000	01 . 51	
01 RM		-	547.000	-	-	-	547.000	175@	
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	216.070.270	-	-	-	216.070.270	01 . 51	
01 RM		-	147.641.829	-	-	-	147.641.829	175@	
04 PNBP		-	68.428.441	-	-	-	68.428.441	175@	

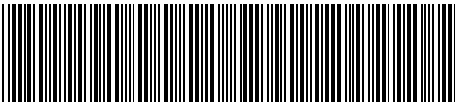
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2350.RCG 01 2351	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.833.230	-	-	-	1.833.230	01 . 51	
	RM	-	1.833.230	-	-	-	1.833.230	175	
	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	-	6.245.390	-	-	-	6.245.390		
2351.ABW 01	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	264.000	-	-	-	264.000	01 . 51	
	RM	-	264.000	-	-	-	264.000	175	
2351.AEA 01	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.054.000	-	-	-	2.054.000	01 . 51	
	RM	-	2.054.000	-	-	-	2.054.000	175@	
2351.AFA 01	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	194.000	-	-	-	194.000	01 . 51	
	RM	-	194.000	-	-	-	194.000	175	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

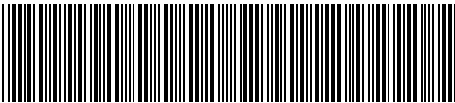


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2351.BCB	Perkara Hukum Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	300.000	-	-	-	300.000	01 . 51	
	01 RM	-	300.000	-	-	-	300.000	175@	
2351.BCE	Penanganan Perkara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.783.390	-	-	-	1.783.390	01 . 51	
	01 RM	-	1.783.390	-	-	-	1.783.390	175@	
2351.BKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.650.000	-	-	-	1.650.000	01 . 51	
	01 RM	-	1.650.000	-	-	-	1.650.000	175@	
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	17.487.854	60.954	-	-	17.548.808		
2352.999	Output Cadangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	155.904	40.763	-	-	196.667	01 . 51	
	01 RM	-	155.904	40.763	-	-	196.667	175@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

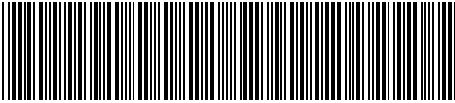


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2352.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	522.000	-	-	-	522.000	01 . 51	
01	RM	-	522.000	-	-	-	522.000	175@	
2352.ACA	Perizinan Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.511.000	-	-	-	1.511.000	01 . 51	
01	RM	-	1.511.000	-	-	-	1.511.000	175@	
2352.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.291.150	-	-	-	3.291.150	01 . 51	
01	RM	-	3.291.150	-	-	-	3.291.150	175@	
2352.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	553.000	-	-	-	553.000	01 . 51	
01	RM	-	553.000	-	-	-	553.000	175@	
2352.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	249.494	-	-	-	249.494	01 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

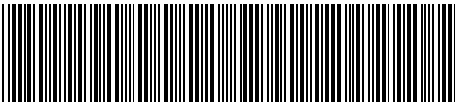


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	249.494	-	-	-	249.494	175	
2352.BII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	35.000	-	-	-	35.000	01 . 51	
01 RM		-	35.000	-	-	-	35.000	175@	
2352.BKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.708.988	-	-	-	4.708.988	01 . 51	
01 RM		-	4.708.988	-	-	-	4.708.988	175@	
2352.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	907.508	-	-	-	907.508	01 . 51	
01 RM		-	907.508	-	-	-	907.508	175@	
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.742.810	20.191	-	-	1.763.001	01 . 51	
01 RM		-	1.742.810	20.191	-	-	1.763.001	175@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



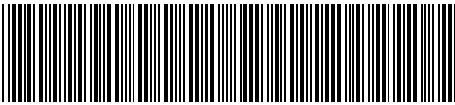
DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2352.RDS	OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.811.000	-	-	-	3.811.000	01 . 51	
	01 RM	-	3.811.000	-	-	-	3.811.000	175@	
2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	-	2.034.487	-	-	-	2.034.487		
2353.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.040.000	-	-	-	1.040.000	01 . 51	
	01 RM	-	1.040.000	-	-	-	1.040.000	175@	
2353.BKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	330.500	-	-	-	330.500	01 . 51	
	01 RM	-	330.500	-	-	-	330.500	175@	
2353.BMB	Komunikasi Publik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	663.987	-	-	-	663.987	01 . 51	
	01 RM	-	663.987	-	-	-	663.987	175@	
032.05.WA	Program Dukungan Manajemen	59.012.285	51.923.426	3.160.715	-	-	114.096.426		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

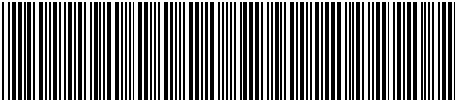


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	59.012.285	51.923.426	3.160.715	-	-	114.096.426		
2355.AEC	Kerja sama (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.600.000	-	-	-	2.600.000	01 . 51	
01	RM	-	2.600.000	-	-	-	2.600.000	175@	
2355.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	614.280	-	-	614.280	01 . 51	
01	RM	-	-	614.280	-	-	614.280	175	
2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	59.012.285	26.743.708	-	-	-	85.755.993	01 . 51	
01	RM	59.012.285	26.743.708	-	-	-	85.755.993	175@	
2355.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.200.000	2.546.435	-	-	3.746.435	01 . 51	
01	RM	-	1.200.000	2.546.435	-	-	3.746.435	175@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kewenangan : (KP)

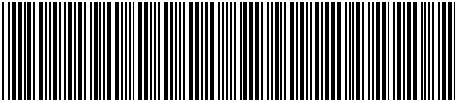
Halaman : II. 9
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2355.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	8.639.209	-	-	-	8.639.209	01 . 51	
01 RM		-	8.639.209	-	-	-	8.639.209	175@	
2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	12.740.509	-	-	-	12.740.509	01 . 51	
01 RM		-	12.740.509	-	-	-	12.740.509	175@	
JUMLAH		59.012.285	332.198.634	4.339.669	-	-	395.550.588		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal PSDKP

ttd.
Pung Nugroho Saksono
196904221992031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



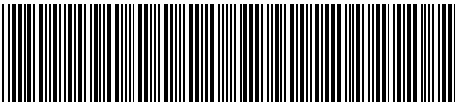
DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	24.537.372	31.111.572	36.287.792	30.657.748	30.971.434	38.663.100	40.009.839	32.353.488	29.707.589	29.375.938	30.508.377	41.366.338	395.550.588
		BELANJA PEGAWAI	1.759.469	3.617.488	8.136.373	3.824.417	3.840.491	7.868.413	3.864.973	3.864.991	3.828.206	3.819.194	3.822.144	10.766.126	59.012.285
		BELANJA BARANG	22.697.914	27.407.752	27.759.844	26.635.826	25.855.354	30.571.206	35.563.127	28.334.561	25.733.199	25.434.829	25.915.575	30.289.447	332.198.634
		BELANJA MODAL	79.989	86.332	391.576	197.505	1.275.590	223.481	581.739	153.935	146.184	121.915	770.658	310.766	4.339.669
		032.05.HB.2350 Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	20.947.228	21.608.382	21.548.930	21.966.253	21.763.180	22.230.623	23.023.571	21.760.060	19.236.659	20.047.953	20.603.786	20.888.852	255.625.477
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	20.867.239	21.526.050	21.460.733	21.880.820	21.673.681	22.097.218	22.882.455	21.639.948	19.182.472	19.960.023	20.533.490	20.803.347	254.507.477
		53 BELANJA MODAL	79.989	82.332	88.197	85.433	89.499	133.405	141.116	120.111	54.187	87.930	70.296	85.505	1.118.000
		032.05.HB.2351 Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	290.750	427.134	606.755	328.214	467.582	625.248	934.200	417.757	608.369	545.919	560.214	433.249	6.245.390
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	290.750	427.134	606.755	328.214	467.582	625.248	934.200	417.757	608.369	545.919	560.214	433.249	6.245.390
		032.05.HB.2352 Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	298.999	520.103	571.734	1.431.314	1.285.841	1.806.578	3.618.719	2.154.942	1.587.887	1.726.522	1.794.773	751.396	17.548.808
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	298.999	520.103	571.734	1.429.379	1.283.408	1.804.082	3.617.439	2.150.618	1.539.401	1.726.522	1.794.773	751.396	17.487.854
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	1.935	2.433	2.495	1.280	4.324	48.486	0	0	0	60.954
		032.05.HB.2353 Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	80.760	106.480	161.473	70.493	155.451	231.979	532.258	203.381	113.188	134.723	163.101	81.201	2.034.487

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (449520) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

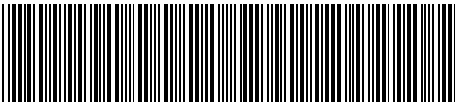
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
032.05.WA.2355		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	80.760	106.480	161.473	70.493	155.451	231.979	532.258	203.381	113.188	134.723	163.101	81.201	2.034.487
		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.919.636	8.449.473	13.398.899	6.861.474	7.299.381	13.768.672	11.901.091	7.817.348	8.161.487	6.920.822	7.386.503	19.211.641	114.096.426
		51 BELANJA PEGAWAI	1.759.469	3.617.488	8.136.373	3.824.417	3.840.491	7.868.413	3.864.973	3.864.991	3.828.206	3.819.194	3.822.144	10.766.126	59.012.285
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.160.167	4.827.984	4.959.148	2.926.920	2.275.232	5.812.678	7.596.776	3.922.857	4.289.770	3.067.642	2.863.997	8.220.254	51.923.426
		53 BELANJA MODAL	0	4.000	303.378	110.136	1.183.658	87.581	439.343	29.500	43.511	33.985	700.362	225.261	3.160.715
		PERKIRAAN PENERIMAAN	0	0	3.606.964	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	5.606.964
		- PNBP (425839)	0	0	1.878.685	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.878.685
		- PNBP (425839)	0	0	1.728.279	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.728.279

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal PSDKP

ttd.
Pung Nugroho Saksono
196904221992031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
IV A. B L O K I R



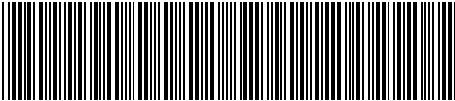
DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [449520] SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.269.938 Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 129.855.019		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 121.720 Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	52 Belanja Barang Rp. 128.896.256		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.935 Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	53 Belanja Modal Rp. 958.763		532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 918.000 Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2350.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.543 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
2350.999	Output Cadangan		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 307.090 Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	2350.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 360.000 Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.800 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.809.294 Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.665.000 Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.800.000 Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
IV A. B L O K I R



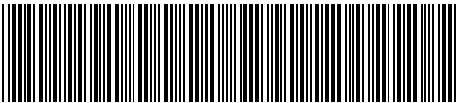
DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [449520] SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2350.BKB	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 640.974
	Pemantauan produk		Belum dilengkapi dengan surat persetujuan Menteri Keuangan terkait pagu PNBP
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 565.605		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
2350.FBA	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.117.200
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.098		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
2350.QHD	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.279
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)
2350.QHD	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 134.462		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 616.580
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 202
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		2351 Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan
2350.QHD	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 136	2351.AEA	Koordinasi
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 562.684
	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
2350.QHD	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 66.320.215		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Belum dilengkapi dengan surat persetujuan Menteri Keuangan terkait pagu PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 491
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
2350.QHD	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.467.252		524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)
	Belum dilengkapi dengan surat persetujuan Menteri Keuangan terkait pagu PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.000
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 202
2350.QHD	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
IV A. B L O K I R

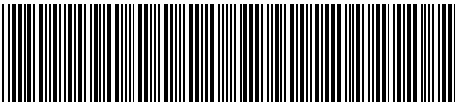


DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [449520] SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2351.BCB	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Perkara Hukum Lembaga		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.366
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 209.088		Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK
2351.BCE	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Penanganan Perkara		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 115.584
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK
2351.BKB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 428.240		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.763
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK
2351.BKB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 920	2352.ABW	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Pemantauan produk		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 99.068
2352	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	2352.ACA	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 963.452		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Perizinan Produk
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
2352.999	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2352.AEA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 250.211
	Output Cadangan		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.898		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 68
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	522141 Belanja Sewa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.056		Koordinasi
	Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
IV A. B L O K I R



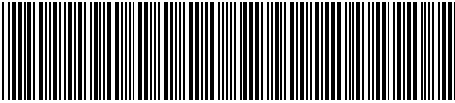
DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [449520] SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2352.AFA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 325.501	2352.QIC	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 221
2352.BII	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	2352.RDS	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 133.629		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
2352.BKB	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	2353	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.105.933
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 153		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
2352.FBA	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	2353.BDC	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.280		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 640.539
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
2352.FBA	Pemantauan produk	2353	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 85
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.601.571		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
2352.FBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 423.869
2352.FBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	2353	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 303.665		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.008
2352.FBA		2353	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
IV A. B L O K I R



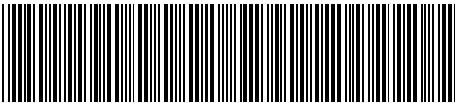
DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [449520] SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2353.BKB	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak tercantum dalam RKBMN Pengadaan
	Pemantauan produk		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
2353.BMB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 140.560		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.158.787
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
032.05.WA	Komunikasi Publik		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.012
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.736		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
2355	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)
	Program Dukungan Manajemen		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 636.302
2355.AEC	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2355.EBB	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 202
	Kerja sama		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2355.EBA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 228.000		523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Data dukung tidak sesuai dengan RAB
	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)	2355.EBC	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 399.090		Layanan Manajemen SDM Internal
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 202		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.214.896
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.600		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Honorarium sudah tidak diatur di PMK SBM		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 312
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	522141 Belanja Sewa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 613.320		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
IV A. B L O K I R



DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [449520] SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

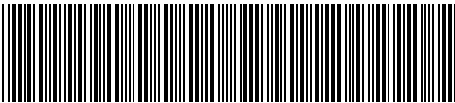
Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 112.513		
	Tahun 2023		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	522141 Belanja Sewa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 214.497		
	Tahun 2023		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.800		
	Tahun 2023		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 149.395		
	Tahun 2023		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.492.758		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.366		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 651.450		
	Tahun 2023		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal PSDKP

ttd.
Pung Nugroho Saksono
196904221992031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.1.449520/2025
IV B. C A T A T A N



DS:5886-0003-7144-3183

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [449520] SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal PSDKP

ttd.
Pung Nugroho Saksono
196904221992031002